



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : PATTA AMIR  
NIK : 7301012711640001  
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Sub Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Jabatan : KEPALA BADAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 24 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**IKHTISAR LHKPN a.n PATTA AMIR  
(Jenis Laporan - Tahun: Periodik – 2023)  
NIK 7301012711640001**

**1. DATA PRIBADI**

Nama : PATTA AMIR  
NIK : 7301012711640001  
No KK : 7301011802080425  
NPWP : 140344771805000  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Tempat/Tanggal Lahir : BENTENG/27 November 1964  
Status Nikah : Menikah  
Agama : ISLAM  
Alamat : KOMPLEKS PERUMAHAN PEMDA BONEA NO. 4, BENTENG, KEPULAUAN SELAYAR, SULAWESI SELATAN  
Nomor Handphone : 0811423279  
Email : pattaamir@gmail.com  
NHK : 621876  
Bidang : EKSEKUTIF  
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
Jabatan : KEPALA BADAN - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
  
Tanggal Laporan : 31 Desember 2023  
Tanggal Kirim : 24 Januari 2024  
Status : Diumumkan Lengkap



**2. DATA KELUARGA**

NO	NAMA	HUBUNGAN DENGAN PN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR / JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	ALAMAT RUMAH
1	SUCIWATI	ISTRI	UJUNG JUMPEA , 12 November 1970 / PEREMPUAN	IBU RUMAH TANGGA	KOMPLEKS PERUMAHAN PEMDA BONEA NO. 4
2	RIFKI ARJUNA EKA PUTRA	ANAK TANGGUNGAN	JAMPEA , 17 Desember 2000 / LAKI-LAKI	MAHASISWA	KOMPLEKS PERUMAHAN PEMDA BONEA NO. 4

**3. JABATAN**

NO	JABATAN - DESKRIPSI JABATAN / ESELON	LEMBAGA	UNIT KERJA	SUB UNIT KERJA
1	KEPALA BADAN	PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**4. DATA HARTA**

**4.1. TANAH / BANGUNAN**

NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jalan / No : LINGKUNGAN BONEA SELATAN RT 002/RW 002 Kel. / Desa : BENTENG UTARA Kecamatan : BENTENG Kab. / Kota : KEPULAUAN SELAYAR Prov. / Negara : SULAWESI SELATAN / INDONESIA	Tanah: 340 m <sup>2</sup> Bangunan: - m <sup>2</sup>	Jenis Bukti: LAINNYA Nomor Bukti: 1 Atas Nama: PASANGAN/ANAK (SUCIWATI) Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: LAINNYA Tahun Perolehan: 2016	Rp. 230.000.000	Rp. 235.000.000	UBAH



NO	LOKASI	LUAS	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
2	Jalan / No : LING. BONEA SELATAN RT. RW. Kode Pos. 92812 Kel. / Desa : BENTENG UTARA Kecamatan : BENTENG Kab. / Kota : KEPULAUAN SELAYAR Prov. / Negara : SULAWESI SELATAN / INDONESIA	Tanah: 468 m <sup>2</sup> Bangunan: - m <sup>2</sup>	Jenis Bukti: SERTIFIKAT Nomor Bukti: 00701 Atas Nama: PN YANG BERSANGKUTAN Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Pemanfaatan: LAINNYA Tahun Perolehan: 2012	Rp. 370.000.000	Rp. 380.000.000	UBAH
Sub Total					Rp. 615.000.000	

**4.2. ALAT TRANSPORTASI / MESIN**

NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : MOTOR Merk : YAMAHA Model : ALL NEW NMAX 155 C/ABS Tahun Pembuatan : 2020 No. Pol. / Registrasi : DD 4298 JD	Jenis Bukti: LAINNYA Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PASANGAN/ANAK (RIFKI ARJUNA EKA PUTRA) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2020	Rp. 27.000.000	Rp. 25.000.000	UBAH
2	Jenis : MOTOR Merk : HONDA Model : SEPEDA MOTOR Tahun Pembuatan : 2014 No. Pol. / Registrasi : DD 5165 JB	Jenis Bukti: BPKB/STNK Asal Usul Harta: HASIL SENDIRI Atas Nama: PASANGAN/ANAK (SUCIWATI) Pemanfaatan: DIGUNAKAN SENDIRI Lainnya: - Tahun Perolehan: 2014	Rp. 4.100.000	Rp. 3.800.000	UBAH



NO	URAIAN	KEPEMILIKAN	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Sub Total		Rp. 28.800.000	

**4.3. HARTA BERGERAK LAINNYA**

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Sub Total		Rp. 0	

**4.4. SURAT BERTAGIH**

NO	URAIAN	NO. REKENING / NO. NASABAH	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
			Sub Total		Rp. 0	

**4.5. KAS / SETARA KAS**

NO	URAIAN	INFORMASI REKENING	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
1	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : SULSELBAR	Nomor : 0422010000027385 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 10.795.850	UBAH
2	Jenis : TABUNGAN Keterangan : - Nama Bank / Lembaga : BNI	Nomor : 0380616649 Atas Nama : PN YANG BERSANGKUTAN	HASIL SENDIRI	Rp. 691.977	UBAH
			Sub Total	Rp. 11.487.827	



4.6. HARTA LAINNYA

NO	URAIAN	ASAL USUL HARTA	NILAI PELAPORAN SEBELUMNYA	NILAI PELAPORAN SAAT INI	KETERANGAN
		Sub Total		Rp. 0	

4.7. HUTANG

NO	URAIAN	NAMA KREDITUR	BENTUK AGUNAN	NILAI AWAL HUTANG	NILAI SALDO HUTANG
			Sub Total	Rp. 0	Rp. 0

5. PENERIMAAN

5.1. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN

NO	JENIS PENERIMAAN	PENYELENGGARA NEGARA	PASANGAN
1	Gaji dan Tunjangan	Rp. 91.346.000	Rp. 0
2	Penghasilan dari Profesi/Keahlian	Rp. 62.454.252	Rp. 0
3	Honorarium	Rp. 25.000.000	Rp. 0
4	Tantiem, Bonus, Jasa Produksi, THR	Rp. 15.174.000	Rp. 0
5	Penerimaan Pekerjaan Lainnya	Rp. 0	Rp. 0
		Sub Total	Rp. 193.974.252

**5.2. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN**

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Hasil Investasi dalam Surat Berharga	Rp. 0
2	Hasil Usaha/Sewa	Rp. 0
3	Bunga Tabungan/Deposito dan Lainnya	Rp. 0
4	Penjualan atau Pelepasan Harta	Rp. 0
5	Penerimaan Lainnya	Rp. 0
	Sub Total	Rp. 0

**5.3. PENERIMAAN LAINNYA**

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
1	Penerimaan Hutang	Rp. 0
2	Penerimaan Warisan	Rp. 0
3	Penerimaan Hibah/Hadiah	Rp. 0
4	Lainnya	Rp. 0



NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL PENERIMAAN KAS
	Sub Total	Rp. 0

**6. PENGELUARAN**

**6.1. PENGELUARAN RUTIN**

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Rumah Tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit)	Rp. 65.000.000
2	Biaya Sosial (antara lain keagamaan, zakat, infaq, sumbangan lain)	Rp. 13.500.000
3	Pembayaran Pajak (antara lain PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain)	Rp. 6.000.000
4	Pengeluaran Rutin Lainnya	Rp. 15.000.000
	Sub Total	Rp. 99.500.000

**6.2. PENGELUARAN HARTA**

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Pembelian/Perolehan Harta Baru	Rp. 0
2	Pemeliharaan/Modifikasi/Rehabilitasi Harta	Rp. 5.000.000



NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
3	Pengeluaran Non Rutin Lainnya	Rp. 2.000.000
Sub Total		Rp. 7.000.000

**6.3. PENGELUARAN LAINNYA**

NO	JENIS PENGELUARAN	TOTAL NILAI PENGELUARAN
1	Biaya Pengurusan Waris/Hibah/Hadiah	Rp. 0
2	Pelunasan/Angsuran Hutang	Rp. 0
3	Pengeluaran Lainnya	Rp. 0
Sub Total		Rp. 0

**7. LAMPIRAN FASILITAS**

NO	URAIAN	NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS	KETERANGAN
1	Jenis : MOBIL DINAS Keterangan : TOYOTA INNOVA	BADAN KEPEGAWAIAN & SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KEPULAUAN SELAYAR	TOYOTA INNOVA
2	Jenis : FASILITAS LAINNYA Keterangan : MOTOR YAMAHA FREEGO	BADAN KEPEGAWAIAN & SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KEPULAUAN SELAYAR	MOTOR YAMAHA FREEGO

**8. TOTAL HARTA KEKAYAAN**



NO	TOTAL HARTA	TOTAL HUTANG	TOTAL HARTA KEKAYAAN
1	Rp. 655.287.827	Rp. 0	Rp. 655.287.827

Catatan :

Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id) serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.

Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.